

Daftar Rancangan Rencana Aksi (Draft 2)

Open Government Indonesia Tahun 2018-2020

Update: 12 November 2018

No	Aksi	Usulan Sasaran	Usulan Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
1	2	3	4	5	6
1	Implementasi Data Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik.	Terimplementasikannya Perpres 13/2018 (sosialisasi, tersedianya peraturan turunan dan integrasi data BO)	1. Terlaksananya sosialisasi tata cara pendaftaran BO di 4 kota (Banjarmasin, Medan, Surabaya, Bali) 2. Tersedianya draft Permen Tata Cara Pendaftaran Koperasi, tersedianya Permen Tata Cara Pendaftaran CV, Firma, penyampaian BO oleh PIC korporasi 3. Tersedia permenkumham tentang sistem pelayanan administrasi korporasi 4. Pengintegrasian data BO ke Kementerian Hukum dan HAM (menunggu konfirmasi dari kemenko perekonomian-EITI dan ESDM)	Kementerian Hukum dan HAM	Kementerian PPN/ Bappenas Sekretariat EITI PPATK Kementerian Keuangan Kemenko Perekonomian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kantor Staf Presiden
		Terpublikasinya data BO untuk sektor ekstraktif (minerba dan migas)	1. Terlaksananya ujicoba pelaporan BO untuk 112 perusahaan minerba dan 69 perusahaan migas (berdasarkan program kerja EITI) 2. Tersedianya data BO perusahaan sektor ekstraktif yang siap untuk diakses publik (berdasarkan program kerja EITI)	Sekretariat EITI	
2	Menyediakan informasi dan data Penerima Bantuan Iuran yang partisipatif	Tersedianya data penerima bantuan iuran sesuai dengan hasil aspirasi masyarakat	1. Terlaksananya sosialisasi edukasi terkait mekanisme verifikasi dan validasi pada xx desa/ kelurahan 2. Terpublikasinya data penerima bantuan iuran dalam papan informasi/ papan pengumuman desa 3. Tersedianya update data program perlindungan sosial bidang kesehatan yang diusulkan oleh masyarakat secara partisipatif	Kementerian Sosial	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

No	Aksi	Usulan Sasaran	Usulan Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan keterbukaan data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di Kementerian/ Lembaga dan daerah	1. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga	1. Terbangunnya komitmen publikasi data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan antara Kementerian Keuangan dan K/L terkait 2. Terpublikasinya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan sampai dengan level kegiatan di portal data APBN	Kementerian Keuangan	Kementerian Pendidikan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Kantor Staf Presiden Komisi Informasi Pusat
		2. Tersedianya data anggaran pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan di pemerintah daerah	3. Terbangunnya portal data APBD (E-budgeting) 4. Terlaksananya implementasi E-Budgeting di 34 provinsi	Kementerian Dalam Negeri	
4	Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan Partisipatif	Tersediannya usulan perencanaan anggaran pendidikan berbasis data NPD	1. Sosialisasi halaman NPD kepada masyarakat dan pemerintah daerah 2. Terselenggaranya kegiatan/forum konsultasi perencanaan anggaran pendidikan dengan masyarakat 3. Tersedianya perencanaan anggaran pendidikan daerah berbasis data NPD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ombudsman RI Kementerian Dalam Negeri
5	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel	1. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif	1. Terlaksananya bimtek perencanaan partisipatif di 36 desa pada 3 provinsi (Maluku, Jawa Tengah dan Sumatera Barat) 2. Tersedianya juknis musyawarah desa dan FGD evaluasi pelaksanaan musdes dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)	Kantor Staf Presiden Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

No	Aksi	Usulan Sasaran	Usulan Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
1	2	3	4	5	6
		2.Tersedianya harmonisasi peraturan kementerian desa terkait dengan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa	3. Tersedianya harmonisasi Permendes 2/2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dengan Permendagri 20/2018 4.Tersedianya roadmap tentang pendampingan desa 5.Tersedianya bimtek penguatan kapasitas pendamping desa untuk dapat melakukan pendampingan musdes yang partisipatif	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislasi.	Tersedianya portal e-legislasi yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Tersedianya SE Kemendagri kepada Sekretariat DPRD untuk berpartisipasi dalam keterbukaan proses legislasi melalui platform E-Legislasi 2. Tersedianya platform e-legislasi dalam website DPRD	Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otonomi Daerah)	Komisi Informasi Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Informasi dan Komunikasi Publik)
7	Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Terciptanya transparansi data kepemiluan yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Terintegrasinya data penyelenggaraan pemilu pada portal satu data 2. Tersedianya perencanaan (roadmap) pengembangan e-rekap yang terdiri dari studi kelayakan dan berbagai kebutuhan teknis lainnya 3. Tersedianya platform e-recap beta yang dapat diujicobakan di daerah	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Kantor Staf Presiden Bawaslu RI Kementerian Dalam Negeri
8	Publikasi Informasi yang Valid Terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik pemerintah	Tersedianya informasi yang valid dan real time terkait ketersediaan obat, tenaga medis, kamar dan fasilitas kesehatan lainnya	Tersedianya informasi tentang ketersediaan layanan kesehatan (kamar, dokter, obat, dan lain sebagainya) di "xx" rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri
9	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Instansi Pemerintah	Terlaksananya forum konsultasi publik di "xx" kementerian dan lembaga	1.Pelaksanaan sosialisasi kepada Pemda dan KDLI 2. Daftar KLDI yang sudah melaksanakan FKP. 3. Jumlah XX pilot project K/L/D	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Desa dan PDT Kementerian Dalam Negeri

No	Aksi	Usulan Sasaran	Usulan Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
1	2	3	4	5	6
10	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam LAPOR!-SP4N	1. Peningkatan jumlah keterhubungan LAPOR-SP4N 2. Peningkatan jumlah pengaduan ditindaklanjuti dalam LAPOR-SP4N 3. Peningkatan tingkat kepatuhan pengelolaan LAPOR-SP4N terhadap SOP	1. Sebanyak "XX" K/L dan Pemerintah Daerah terhubung dengan LAPOR-SP4N. 2. Sebanyak "XX" persen pengaduan yang masuk ke LAPOR-SP4N telah ditindaklanjuti 3. Sebanyak XX persen pengelolaan LAPOR-SP4N oleh KLD masuk kategori BAIK.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kantor Staf Presiden Ombudsman RI Kementerian Dalam Negeri
11	Pengembangan Sistem Layanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peningkatan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam sistem satu pintu untuk pengaduan dan pengawasan KLHK	1. Tersedianya SOP sinergi sistem pengaduan dan standar indikator pengelolaan dan penyelesaian pengaduan di internal KLHK. 2. Terselaksikannya xxx laporan pengaduan dalam LAPOR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian PAN dan RB Kantor Staf Presiden Ombudsman RI
12	Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Terpublikasikannya seluruh dokumen pengadaan dalam bentuk data terbuka	1. Tersedianya update SK LKPP terkait Daftar Informasi Publik untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP 2. Tersedianya rekomendasi implementasi SK DIP Barang dan jasa pemerintah oleh LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

No	Aksi	Usulan Sasaran	Usulan Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
1	2	3	4	5	6
			3. Terlaksananya konsultasi publik terkait dengan pengaturan DIP PBJ di pemerintah pusat oleh KIP 4. Terbitnya Perki Terkait dengan DIP PBJ di pemerintah pusat oleh KIP	Komisi Informasi Pusat	
13	Penguatan tata kelola penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tersedianya perencanaan strategis dan tata kelola penyelenggaraan keterbukaan pemerintah Indonesia	1. Terselenggaranya konsultasi publik terkait draft Peraturan Presiden tentang Open Government Indonesia 2. Tersosialisasikannya Peta Jalan keterbukaan pemerintah Indonesia 3. Indeks keterbukaan pemerintahan Indonesia terpublikasi kepada masyarakat luas 4. Teralokasinya dukungan pendanaan untuk pemerintah daerah dan CSO untuk memperkuat open government 5. Terpublikasinya SK terkait pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah Indonesia 2018-2020	Bappenas	Kantor Staf Presiden Kementerian Luar Negeri Kementerian Keuangan
14	Pengarusutamaan nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah pada Pelaksanaan Smart City	Teradopsinya nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah dalam pelaksanaan Smart City	1. 25 kota/ kabupaten pelaksana Smart City mendapatkan informasi terkait nilai-nilai dalam keterbukaan pemerintah 2. Tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi ataupun panduan Smart City yang memuat nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Dalam Negeri Kantor Staf Presiden
15	Digitalisasi Permohonan Informasi Publik	Tersedianya mekanisme permohonan informasi publik secara elektronik yang dapat diakses	1. Tersusunnya regulasi untuk permohonan informasi publik secara elektronik (revisi Perki No. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik) 2. 'xx' jumlah Kabupaten/Kota yang terhubung dengan mekanisme permohonan informasi publik menggunakan LAPOR! 3. Tersedianya dokumen penilaian penilaian keterbukaan informasi publik yang memuat indikator implementasi Satu Data Indonesia	Komisi Informasi Pusat (KIP)	Kantor Staf Presiden

No	Aksi	Usulan Sasaran	Usulan Indikator Capaian	Penanggung Jawab	K/L/D/I Terkait
1	2	3	4	5	6
16	Perluasan serta Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Layanan Bantuan Hukum	Tersedianya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan bantuan hukum	1. Jumlah Perda Bantuan Hukum tingkat kabupaten/kota meningkat menjadi 100 Perda Bantuan Hukum ((19% kabupaten memiliki Perda Bantuan Hukum) 2. Jumlah Perda Bantuan Hukum tingkat Provinsi meningkat menjadi 21 Perda Bantuan Hukum ((60% provinsi memiliki Perda Bantuan Hukum) 3. Total anggaran bantuan hukum dari APBD meningkat menjadi Rp 20 milyar 4. Jumlah OBH meningkat menjadi 600 OBH 5. Persebaran OBH meluas di 210 (41%) kabupaten. 6. Jumlah penerima layanan bantuan hukum (informasi, konsultasi dan pendampingan hukum) meningkat menjadi 20.000 orang. 7. Indeks kepuasan penerima layanan bantuan hukum membaik, di mana 50% penerima bantuan hukum menyatakan cukup puas dan sangat puas.	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)